



# Kisruh Anggaran 2015

## Disinyalir Ada Berkas APBD 'Bodong'

**GUBERNUR** DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akhirnya angkat bicara mengenai draft Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp 73,08 triliun, yang tak kunjung diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut orang nomor satu di ibukota itu, draft tersebut sudah dikirimkan ke Kemendagri. Namun dikembalikan lagi lantaran tidak ada tanda tangan pimpinan DPRD DKI Jakarta. "Nggak apa-apa. Dulu juga begitu," ujar Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, kemarin (9/2).

Ahok mengungkapkan, Pemprov DKI mengirimkan draft Perda APBD DKI 2015 versi pengesahan Paripurna DPRD DKI tanpa tanda tangan pimpinan DPRD supaya kalangan dewan tidak lagi mengubah-ubah anggaran tanpa sepengetahuan Pemprov DKI. Sehingga Kemendagri bisa memiliki anggaran versi yang benar, dan bisa membandingkan anggaran yang dikirim versi DPRD.

Penolakan draft tersebut, sambung Ahok, terjadi karena ada oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang mengirimkan surat ke Kemendagri bahwa draft Perda APBD 2015 tidak sah. "Ini persoalan oknum DPRD DKI ngomong atau kirim surat ke Kemendagri bahwa yang dikirim dari kita nggak sah. Seharusnya dari mereka. Kita mau nggak versinya mereka, lagi ditukar-tukar? Nggak fair kan. Makanya saya harap Mendagri iktin yang kita kirim, bukan dari DPRD. Kan sudah ketok palu. Kalau dari DPRD lagi dia ganti-ganti lagi anggarannya," tegas dia.

Menurut Ahok, buktinya terdapat oknum DPRD DKI yang berusaha ganti anggaran tanpa sepengetahuan Pemprov DKI. Anggaran yang diganti atau anggaran titipan mencapai Rp 8,8 triliun. "Mau buka-bukaan nggak? Oknum DPRD berusaha ganti Rp 8,8 triliun, saya nggak mau ngasih. Dia nggak mau ngaku. Ini saya ada saksi semuanya ini, panggil saja polisi kalau nekat. Semua staf DPRD kerja siang malam ngapain? Itu mereka ganti-ganti dana semua. Dana dicopot-copotin diganti. Rp 8,8 triliun nilainya," tandas dia.

Untuk mengantisipasi adanya anggaran siluman yang dimasukkan setelah pengesahan Perda APBD DKI 2015, Ahok tetap memberlakukan e-budgeting. Sehingga anggaran dari luar penetapan tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD DKI 2015. "Tetap e-budgeting. Nggak boleh di-print

out keluar. Kalau itu, curi duit rakyat saya bilang. Nah kalau alasan itu, kita nggak mau dikasih APBD, ya sudah nggak usah. Nggak usah! Orang Jakarta nggak butuh APBD kok. Kamu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting urusin sampah," seru dia.

Di tempat terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Bestari Baru mengatakan, APBD yang diajukan mitra kerjanya itu tak sesuai dengan pembahasan dan pengesahan yang telah dilakukan kedua belah pihak. "Isi APBD bukan hasil dari pembahasan dan pengesahan di dewan. Bagaimana mengetahui itu, ada tembusan dari BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), dan ada tanda terima dari Kemendagri bahwa isinya bukan dari yang dibahas," ungkap dia.

Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, apa yang dilakukan eksekutif bisa berdampak hukum. Karenanya, pada tanggal 5 Februari 2015, pihaknya mengirimkan surat pada Kemendagri agar tidak langsung mengesahkan APBD. "Kami menyatakan bahwa APBD yang dikirim eksekutif adalah ilegal. Hak budget itu adanya di dewan. Jadi kita tidak ingin bertanggungjawab atas itu," tandas Bestari.

Tak hanya itu, sambung dia, terdapat berkas semacam 'sogokan' yang diajukan eksekutif kalangan dewan saat rapat pembahasan RAPBD. "Ada berkas di kita, ada semacam 'sogokan'. Tadi saya BBM ke gubernur, kenapa ada tawaran Rp 12 triliun agar dewan tidak utak-utik APBD. Ini siapa yang siluman sebenarnya? Itu dari Sekda. Tapi percayalah tidak

### APBD DKI JAKARTA

#### • Dua versi dana 'siluman'

- Penambahan anggaran Rp 8,8 T (sebelum ketok palu)
- Penambahan anggaran Rp 2,6 T (pasca ketok palu)

### VERSI AHOK:

#### • Pengembalian APBD

- Oknum dewan kirim surat ke Mendagri bahwa anggaran tidak sah
- Staf-staf di DPRD mengganti alokasi anggaran

### VERSI DEWAN

#### • Berkas yang diajukan ke Mendagri tak sah

- Tidak sesuai hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif
- Ada upaya suap oleh oknum eksekutif
- Menawarkan alokasi dana Rp 12 T kepada dewan
- Bertujuan agar anggaran tidak diotak-atik

GIMBAL/INDOPOS

gelondongan untuk beberapa proyek yang sudah memiliki nomenkelatur. "Untuk jadi main-mainan dewan. Di antaranya itu pembebasan tanah dan pembelian eskavator. Memangnya rakyat Jakarta itu cuma butuh alat berat apa?" kata dia. (wok/pes)

ada satu pejabat daerah pun di zaman sekarang ini yang berani menawarkan apa pun tanpa izin atau desakan pimpinan," beber dia.

Hal senada diungkapkan Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar Hasibuan. Ia mengungkapkan, anggaran sebesar Rp12 triliun dimaksud sifatnya